

HYMNE MARS MASKOT

2018

PERDA NOMOR 01 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG HYMNE, MARS DAN MASKOT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menanamkan rasa cinta kepada tanah air khususnya Kabupaten Lampung Timur dan mendorong warga masyarakat berperan serta dalam mengisi pembangunan dipandang perlu menetapkan hymne, mars dan mascot Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa hymne, mars dan maskot Kabupaten Lampung Timur merupakan sarana pemersatu, jati diri (identitas) dan wujud eksistensi daerah yang menjadi simbol dan kehormatan daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1967; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 1999; Kepmendagri No 49 Tahun 1989.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Maksud dan Tujuan; Hymned an Mars; Maskot; Penggunaan Hymne, Mars dan Maskot; Tata Cara Penggunaan Hymned an Mars; Larangan; Tata Cara Pelaksanaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Pidana.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018

PENGELOLAAN SAMPAH

2018

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 8 Tahun 1981, UU No 26 Tahun 2007, UU No 18 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 82 Tahun 2001; PP No 15 Tahun 2010; PP No 81 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 33 Tahun 2010, Perda No 04 Tahun 2012, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola; Hak dan Kewajiban; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Kerjasama dan Kemitraan; Pendanaan dan Kompensasi; Peran Serta Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Larangan; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018

SATUAN PENDIDIKAN

2018

PERDA NOMOR 03 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan mutu, efektivitas, efisiensi dan kelancaran proses belajar mengajar pada satuan pendidikan dasar, pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan dasar sehingga dapat dihasilkan satuan pendidikan dasar yang berkualitas;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Permen Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas pengelolaan satuan pendidikan dasar baik mengenai pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; Permen Pendidikan No 15 Tahun 2010; Permen P&K No 84 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Tujuan dan Ruang Lingkup; Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar; Ketentuan Pidana.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

2018

PERDA NOMOR 04 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa penempatan tenaga kerja memerlukan mekanisme pasar yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat, sehingga diperoleh perlindungan tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur secara optimal dari awal rekrutmen, pra penempatan, penempatan di Negara tujuan dan purna penempatan;
- Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- UU No 12 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 1981, UU No 13 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014, UU No 18 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2017; PP No 3 Tahun 2013; PP No 4 Tahun 2013; PP No 4 Tahun 2015; Perpres No 81 Tahun 2006, Kepres No 36 Tahun 2002; Permen TK & Trans No 09/Men/V/2009, Permen TK & Trans No Per.07/Men/V/2010; Permen Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
- Asas dan Tujuan; Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung Timur; Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; Kewajiban Pemerintah Daerah; Pembinaan; PPPMI, Izin Pendirian Kantor Cabang PPPMI dan Tatacara Rekrutmen; Perjanjian Kerja; Pembekalan Akhir Pemberangkatan; Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri; Komponen Biaya yang Dapat Dibebankan Kepada Calon PMI; Penempatan TKI untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri; PMI yang Bekerja Secara Peseorangan; Pemantauan Penempatan PMI; Kepulangan PMI; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi dan Pidana.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

2018

PERDA NOMOR 05 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG SISTEM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengembangkan sistem pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat;
- Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pelayanan jaminan kesehatan masyarakat
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 12 Tahun 2013; Pemenkes No 69 Tahun 2013; Permenkes No 28 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Maksud dan Tujuan; Asas dan Prinsip Pelayanan Jaminan Kesehatan; Lembaga Penyelenggara; Penyelenggara; Kepesertaan; Manfaat Program; Penyedia Pelayanan Kesehatan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

2018

PERDA NOMOR 06 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan bidang ketenagakerjaan yang sangat strategis dan pembangunan daerah diperlukan pengaturan di bidang ketenagakerjaan berkenaan dengan hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Perda tentang Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Timur
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU 7 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1981; UU No 12 Tahun 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 2 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 78 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015; Pemen TK & Trans No 31 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Landasan, Asas dan Tujuan; Jenis Perselisihan; Upaya Pencegahan; Perselisihan Hubungan Industrial; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Penutupan Perusahaan; Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018

PENGELOLAAN ASET DESA

2018

PERDA NOMOR 07 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien terbuka serta bertanggung jawab perlu pengelolaan aset desa yang baik.
- Agar pengelolaan aset desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan pedoman dalam mengelola aset desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1999, UU No 06 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendes No 2 Tahun 2015; Pemendagri No 1 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Ruang Lingkup; Jenis Aset dan Kekayaan Desa ; Pengelolaan; Perencanaan; Pengadaan ; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pelaporan; Penilaian; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018

PERTANIAN ORGANIK

2018

PERDA NOMOR 08 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
- Bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1992; UU No 12 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 18 Tahun 2012; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 1983; PP No 69 Tahun 1999; PP No 102 Tahun 2000; PP Nomor 68 Tahun 2002; PP Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 21 Tahun 2005; Permentan No 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; Permentan No 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No 64/Permentan/OT.140/5/2013
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup; Budidaya Pertanian Organik; Sarana Produksi; Pengorganisasian; Sertifikasi dan Sistem Jaminan Partisipatif; Pemberian Insentif; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018

PENYAKIT MENULAR

2018

PERDA NOMOR 09 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

ABSTRAK : - Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Lampung Timur dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat.

- Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang merupakan tanggungjawab semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- UU No 4 Tahun 1984; UU No 12 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1991; Permenkes No 1501/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No 43 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
- Maksud dan Tujuan; Penyakit Menular; Penyelenggaraan; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Sumber Daya; Pembinaan dan Pengawasan; Penelitian dan Pengembangan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

2018

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003; UU No 01 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; Perda No 01 Tahun 2003; Perda No 25 Tahun 2011; Perda No 18 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Nama, Objek Tarif dan Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan; Prinsip dan Tujuan Penetapan Besaran Tarif; Kelas Perawatan; Jenis Pelayanan Kesehatan; Tempat Pelayanan; Pelayanan Pengujian Kesehatan dan Mediko Legal; Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan; Komponen dan Besaran Tarif; Kebijakan Tarif; Tata Cara Pengenaan Biaya Pelayanan Kesehatan, Tempat Pembayaran dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tarif; Kedaluawarsa; Pengelolaan Pendapatan BLUD; Peninjauan Tarif Pelayanan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018

PENCABUTAN PERDA RETRIBUSI

2018

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009, maka Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dan harus dicabut
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2017; Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

2018

PERDA NOMOR 12 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga Negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- Bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejala ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil sehingga petani dan nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1992, UU No 12 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 2004; UU No 16 Tahun 2006; UU Nomor 18 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2016; UU Nomor 11 Tahun 2016; PP No 30 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2009; Permentan No 82/Permentan/OT.140/8/2013; Permentan No 67/Permentan/54.050/12/2016; Permenhut Nomor P.57/Menhut-II/2014; Kemenhut Nomor KEP.14/MEN/1/2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Perlindungan Petani dan Nelayan; Pemberdayaan Petani dan Nelayan; Pembiayaan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; dan Sanksi.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2018

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir maka perlu ditetapkan dengan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1985; UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 8 Tahun 2006; PP No 22 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 31 Tahun 2016; Permendagri No 11 Tahun 2017; Perda No 02 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

2018

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2018, 18 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1985; UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 8 Tahun 2006; PP No 22 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 31 Tahun 2016; Permendagri No 11 Tahun 2017; Perda No 02 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 2.131.099.762.848,50 bertambah sejumlah Rp 77.505.813.823,73 sehingga menjadi Rp 2.208.605.576.672,23 dengan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2018

PERDA NOMOR 16 TAHUN 2018, 31 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokmen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, maka perlu menetapkan dengan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No 12 Tahun 1985; UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 8 Tahun 2006; PP No 22 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 31 Tahun 2016; Permendagri No 11 Tahun 2017; Permendagri No 38 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda No 02 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

